

## Peran Pemilik Modal (*Pengamba'*) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Gardanan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

Yudi Jihwindriyo<sup>1</sup>, Sanggar Kanto<sup>2</sup>, Darsono Wisadirana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya

<sup>2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya

### Abstrak

Nelayan memiliki hubungan ekonomi dengan *pengamba'* untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Menegasikan peran *pengamba'* menjadi upaya yang sia-sia saat tidak mendapatkan dukungan masyarakat nelayan. Tulisan ini berupaya mengatur peran *pengamba'* untuk menjadi agen dalam pemberdayaan nelayan, atau dalam konsep Susilo (2004) disebut Adaptor Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (i) hubungan sosial dan ekonomi antara *pengamba'* dan nelayan, (ii) faktor-faktor yang menunjang peran strategis *pengamba'* dalam pemberdayaan nelayan, dan (iii) membuat rumusan bentuk pelibatan *pengamba'* dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Penelitian dilakukan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik penentuan informan *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) hubungan sosial ekonomi *pengamba'* dan nelayan berpola patron-klien, (ii) permodalan yang diberikan oleh *pengamba'* nelayan berdampak pada keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan dan keberlanjutan sumber pendapatan nelayan, (iii) relasi antara *pengamba'* dan nelayan diatur dalam lembaga lokal berbentuk Kelompok Usaha Bersama agar *pengamba'* mampu mengembangkan usaha dan nelayan tidak terlibat dalam sistem bagi hasil yang eksploitatif. Mekanisme bagi hasil dalam lembaga lokal tersebut disarankan diatur oleh pemerintah daerah.

Kata kunci : *pengamba'*, patron-klien, adaptor sosial, kelembagaan lokal.

### Abstract

The fishermen are much linked to *pengamba'* to meet capital requirements. Negating the role *pengamba'* in fishing communities is a useless effort when not getting support by fishing communities. This article try to setting *pengamba'* role to be an agent in the empowerment of fishermen, or by a concept that offered by Susilo (2004) as a Social Adapter. The purposes of this study were to (i) describe the social and economic relations between the owners of capital (*pengamba'*) and fishermen, (ii) analyze the factors that support the strategic role of the owners of capital (*pengamba'*) in the empowerment of fishermen, and (iii) build a formulation of the forms of engagement owners of capital (*pengamba'*) in empowering the fishing communities as an effort to reduce poverty. The study was conducted in the village Kedungrejo Muncar District of Banyuwangi. The research use qualitative approach with case study method. Informants were determined by purposive and snowball sampling. Data were analyzed using data analysis techniques interactive model (Miles, Huberman and Saldana, 2014). The results showed that (i) Socio-economic relations *pengamba'* and fishermen patterned patron-client (ii) capital provided by *pengamba'* fishers affected the sustainability of fishing activities and sustainable sources of income of fishermen, (iii) the relationship between *pengamba'* and fishermen organized in local agencies form Joint Business Group in order *pengamba'* capable of expanding and fishermen not to engage in exploitative profit-sharing. The mechanism for the results suggested in the local institutions regulated by local governments.

Keywords : *pengamba'*, patron-klien, social adaptor, local institutions.

---

Alamat Korespondensi Penulis :

Yudi Jihwindriyo

Email : [jihwindriyo@gmail.com](mailto:jihwindriyo@gmail.com)

Alamat : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur,  
Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya (60236)

## PENDAHULUAN

Peran *pengamba'* sangatlah dominan di tengah keterbatasan nelayan dalam mengakses sumber pembiayaan formal yang dibentuk pemerintah. Upaya pemerintah menggeser peran *pengamba'* maupun tengkulak telah dilakukan dengan membentuk Koperasi Mina, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (BLM-PUMP).

Namun, dalam implementasinya, satu per satu lembaga ekonomi bentukan pemerintah yang ingin menegasikan peran *pengamba'* tersebut tidak bertahan lama karena kalah bersaing dengan pranata ekonomi lokal yang sudah melembaga dan mengakar di lingkungan masyarakat nelayan. Bahkan, Bahrul Ulum (2003) menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada satu pun lembaga pemerintah yang bisa berperan seperti yang dilakukan oleh *tengkulak* [1]. Pernyataan ini kemudian didukung oleh (Kusnadi, 2006) yang menyatakan bahwa ide atau gagasan pembentukan kelembagaan baru hanya bisa dilakukan jika memang tidak ada satupun pranata atau kelembagaan sosial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir [2].

Susilo *et al* (2010) menyatakan bahwa pembangunan perikanan selama ini sering mengabaikan analisis struktur sosial masyarakat pesisir[3]. Menurut Kusnadi, idealnya kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir harus mampu mengoptimalkan pranata budaya atau kelembagaan sosial yang fungsional mengatur dan mengawal kehidupan mereka. Pelaku pemberdayaan harus mampu mengidentifikasi secara cermat lembaga atau pranata ekonomi maupun sosial yang selama ini banyak berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan [2].

Masalah lain yang sering menimbulkan perdebatan adalah berkembangnya *stereotip negative* yaitu dengan menyamakan makna *pengamba'* dengan rentenir. Maka dalam beberapa kesimpulan, keberadaan mereka harus digantikan oleh lembaga keuangan yang resmi. Pandangan, pendapat, maupun kesimpulan terhadap fungsi *pengamba'* di kalangan nelayan menjadi kurang tepat karena persepsi terhadap *pengamba'* tidak ditempatkan dalam fungsi mereka sehari-hari (*emic view*), tetapi berangkat dari persepsi peneliti sendiri (*etic view*). Maka tidak mengherankan jika kemudian kesimpulan yang diambil oleh pengambil kebijakan adalah

menggeser bahkan menghilangkan peran *pengamba'* dari masyarakat nelayan.

Berdasarkan data Simpadu Bappenas, jumlah kepala rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 persen terendah yang bekerja di bidang perikanan tangkap adalah sebesar 494.602 jiwa. Di Jawa Timur, jumlah kepala rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 persen terendah yang bekerja di bidang perikanan tangkap sebanyak 69.052 atau 13.96 % dibanding angka kemiskinan nelayan di perikanan tangkap skala nasional. Lebih lanjut, di Banyuwangi terdapat 5,096 rumah tangga miskin di sektor perikanan atau sebesar 7,37% dari nelayan miskin di perikanan tangkap Jawa Timur. Di Muncar nelayan miskin pada sektor perikanan tangkap sebanyak 2,701 atau sebesar 53% dari total nelayan perikanan tangkap di Banyuwangi. Pada tingkat desa, khususnya di Desa Kedungrejo adalah sebanyak 1,070 RT atau sebesar 39,6 % dari keseluruhan nelayan miskin Muncar yang berkecimpung dalam perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkap ikan di Muncar adalah sebanyak 1873 kapal, dan berdasarkan data lapangan diketahui bahwa 70% dari total kapal tersebut merupakan kapal dengan sistem *amba'an* (kepemilikan modal kapal sebagian berasal dari *pengamba'*).

Saat ini penting untuk mengubah cara pemberdayaan masyarakat nelayan. Kedudukan para *pengamba'* di Muncar bukan terbatas dalam fungsinya di bidang ekonomi melainkan pada kedudukan sosial yang dalam banyak hal menjadi sumber solusi pada kelompok nelayan maupun rumah tangga nelayan. Semakin menggeser kedudukan dan peran *pengamba'*, maka sama halnya menjauhkan nelayan dengan tumpuan hidup sehari-hari mereka. Melibatkan *pengamba'* dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi salah satu alternatif atau jalan lain menjauhkan nelayan dari kemiskinan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menganalisis peran *pengamba'* secara ilmiah dan alamiah tanpa mengintervensi objek penelitian. Selain itu, meskipun sasaran penelitian terbatas pada peran *pengamba'*, namun peneliti mencoba mempertahankan keutuhan dari objek penelitian, dalam arti objek dipelajari sebagai sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi dari problematika masyarakat pesisir di Desa Kedungrejo.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan teknik penentuan informan *snowball sampling* khususnya pada *pengamba'* dan nelayan, sedangkan teknik *purposive sampling* digunakan pada informan Administrator PPI Muncar, Camat Muncar dan Kepala Desa Kedungrejo. Selain wawancara, data juga diperoleh dari observasi lapangan dan dokumen terkait. Data dalam penelitian ini didominasi dari hasil wawancara dan observasi, selain itu juga terdapat data kuantitatif yang berasal dari dokumen pendukung mengenai potensi perikanan Muncar.

**Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah analisis data model interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu (a) kondensasi data, dilakukan dengan menganalisis transkrip wawancara hasil pengumpulan data dari *pengamba'*, nelayan, dan Camat Muncar, Kepala Desa Kedungrejo dan Administrator PPI Muncar. Selain itu, peneliti mengabstraksi hasil observasi dan beberapa dokumen yang berisi data potensi perikanan Muncar (b) reduksi data, dilakukan dengan cara membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sejenis yang sudah diberi kode kemudian dikelompokkan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks, tabel maupun bagan/flowchart. dan (c) penarikan kesimpulan/ verifikasi, berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data [4].

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum, aktivitas ekonomi nelayan terbatas pada aktivitas produksi/penangkapan ikan. Tidak terlibatnya nelayan pada tahapan pemasaran menjadikannya memiliki daya tawar yang rendah terhadap harga komoditas perikanan yang dihasilkannya. Secara lebih rinci disajikan beberapa kendala dalam hal pemasaran hasil produksi perikanan tangkap di Muncar antara lain :

1. Kesenambungan produksi
2. Kurang memadainya pasar
3. Panjangnya saluran pemasaran produk
4. Rendahnya kemampuan tawar menawar
5. Fluktuasi harga
6. Tidak tersedianya informasi pasar

**Tabel 1 Penentuan dan Pembentukan Harga di Pasar**

**Perikanan Tangkap Muncar**

Kondisi ideal	Hasil lapangan
Mekanisme lelang yang dilakukan oleh TPI	TPI tidak berfungsi sebagai lembaga pemasaran, namun hanya sebagai penarik iuran dan setoran untuk hasil tangkapan diatas 30 ton
Nelayan memiliki harga pasaran yang baik melalui tawar menawar	Ketetapan harga dari pabrik menjadi acuan penentuan harga bagi satuan pemasaran di level bawah yaitu <i>pengamba'</i> dan bakul Saat ini nelayan berperan sebagai penerima harga ( <i>price taker</i> ) dan eksportir berperan sebagai pembuat harga ( <i>price maker</i> )
Nelayan mengetahui harga nilai jual yang berlaku di pasaran	Pembentukan harga dilakukan sepihak sehingga bisa berubah kapan saja.

Sumber : Herlambang (2014) diolah oleh penulis [5]

Dari ketiga mekanisme pembentukan harga di Muncar, yang paling mudah ditemui adalah penentuan harga sepihak yang dilakukan oleh pabrik. *Pengamba'* bertindak sebagai aktor perantara antara nelayan dan pengolah (pabrik) maupun konsumen. Ikan yang berasal dari *pengamba'* sebagian besar langsung diterima oleh pabrik pengolahan ikan. Saat ini jumlah pabrik yang berada di Kecamatan Muncar sejumlah 19 pabrik pengolahan ikan dengan pasar utama untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan juga domestik.

***Pengamba'***

Secara sederhana, pemilik modal (*pengamba'*) dapat didefinisikan sebagai pihak yang menerima dan menjualkan ikan hasil tangkapan nelayan. Penjualan ikan dilakukan ke pabrik maupun ke pedagang ikan di sekitar pesisir. *Pengamba'* memiliki pengaruh atas kontribusi yang dilakukan terhadap pendapatan nelayan. Dalam persepsi masyarakat pesisir Muncar, *pengamba'* adalah pihak yang paling berkontribusi terhadap keberlangsungan usaha nelayan. *Pengamba'* menjadi tumpuan keperluan nelayan saat akan melaut maupun setelah melaut.

*Pengamba'* bukan pengganda uang atau rentenir. Aktivitas *pengamba'* memudahkan nelayan dalam memperoleh permodalan. Jika selama ini pola hubungan yang terbentuk dari aktivitas ekonomi nelayan dengan *pengamba'* dianggap mengarah pada munculnya hubungan yang eksploitatif, pada masyarakat nelayan

Muncar tidak ditemukan fakta demikian. Persepsi buruk nelayan mengenai eksploitasi yang berlebihan diberikan nelayan kepada “*bank thithil*” atau bank harian yang memberikan pinjaman dengan bunga diatas 30%.

Tabel 2 Perbedaan antara *Pengamba'* dan Rentenir

<i>Pengamba'</i>	Rentenir
Pinjaman tidak terbatas waktu	Pinjaman terbatas waktu
Kompensasi pinjaman adalah kepatuhan menjual ikan	Kompensasi pinjaman adalah bunga
Berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi nelayan	Tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas ekonomi nelayan

Sumber : Data lapangan 2015

Singkatnya, ada dua penyedia keuangan informal yang hadir di tengah masyarakat nelayan. Pertama, *rentenir*. Kedua, *pengamba'*. Pemisahan jenis penyedia kredit informal ini karena dalam penyebutannya, *pengamba'* sering disamakan dengan *rentenir* atau *lintah darat*. Kendati keduanya tidak menggunakan agunan, namun dalam praktiknya pada aktivitas ekonomi masyarakat nelayan keduanya tidak dapat disamakan.

Dalam keseharian masyarakat nelayan Muncar, *pengamba'* besar sering disebut sebagai *amba'an tengah*. *Amba'an tengah* melakukan aktivitas mengambil ikan nelayan di tengah laut dengan cara menghampiri kapal. *Amba'an tengah* sudah memiliki hubungan khusus dengan kapal yang akan dituju. Saat kapal akan mendarat, nelayan melakukan kontak dengan *pengamba'* tengah yang kemudian akan menghampiri kapal nelayan menggunakan perahu. *Amba'an/blantik darat* adalah *pengamba'* kecil yang membeli ikan di darat. Aktivitas jual-beli ikan berlangsung di pinggir pantai. Saat kapal menepi, banyak dijumpai *blantik darat* melakukan jual beli ikan dari *amba'an tengah* maupun ABK, pengurus kapal dan nelayan kecil lainnya. Pada *amba'an darat*, aktivitas yang dominan adalah jual beli ikan, bukan perantara perdagangan ikan.

Prinsip melakukan system *amba'an* adalah adanya *trust* antara nelayan pemilik kapal dan *pengamba'*. Menentukan nelayan yang mampu dalam mengoperasikan kapal dengan baik menjadi syarat penting guna menghindari adanya kerugian di kemudian hari. Salah satu unsur modal sosial yaitu kepercayaan menjadi dasar bergabungnya nelayan ke dalam sistem *amba'an*. Menurut Putnam (1995) rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko

dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya [6].

Para *pengamba'* di Muncar telah memiliki kesepakatan dan kesepahaman mengenai besaran *stan* yang ditentukan. Besaran *stan* yang diajukan oleh *pengamba'* bergantung dari jumlah dana yang dipinjamkan. Semakin banyak dana yang diberikan sebagai pinjaman, maka akan semakin banyak juga pemotongan harganya.

Selama ini belum pernah ada pengaturan besaran *stan* atau margin antara nelayan dan *pengamba'* oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengaturan sistem bagi hasil tidak bisa dilakukan karena:

1. Tidak ada data yang pasti mengenai jumlah *pengamba'*
2. Sebagai pranata ekonomi lokal, sistem *amba'an* bersifat informal
3. Modal *pengamba'* dirintis sendiri secara pribadi tanpa campur tangan pemerintah
4. Resistensi *pengamba'* untuk mempertahankan sumber penghasilan

Intervensi pemerintah dalam sistem pemotongan harga antara *pengamba'* dan nelayan menjadi penting agar tidak terjadi kecurangan dalam penimbangan ikan dan menghindari pemotongan harga yang terlalu timpang. Sehingga, pola hubungan eksploitatif bisa diminimalisir.

Scott (1989) memberikan dua ciri eksploitasi; *Pertama*, eksploitasi harus dilihat sebagai suatu tata hubungan antara perorangan, kelompok atau lembaga dan adanya pihak yang dieksploitasi. Artinya, Interaksi sosial dalam arus hubungan pertukaran antara patron dengan klien tidaklah berlangsung dalam posisi kesetaraan, karena dominansi kekuasaan dan kepemilikan sumberdaya ada pada patron. Kapital dalam bentuk uang menjadi salah satu sumber daya yang paling tampak dalam hubungan *pengamba'* dan nelayan. *Kedua*, eksploitasi merupakan distribusi tidak wajar dari usaha dan hasilnya dan memerlukan ukuran tentang keadilan distribusi untuk mengukur tata hubungan yang ada [7].

Jika dipandang dari pendekatan ekonomi, kesan eksploitatif tampak pada pola pertukaran sumber daya antara nelayan dan *pengamba'*. Resiko yang sangat besar, bahkan sampai pada resiko nyawa nelayan, dirasa kurang sebanding dengan pendapatan nelayan ABK. Sebagai pihak

yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas penangkapan ikan di laut, resiko yang dihadapi *pengamba'* hanya pada kerugian akibat tidak diberlakukannya pinjaman bunga. Namun, saat nelayan mendapatkan ikan, *pengamba'* akan mendapatkan keuntungan tersebut melalui pemotongan harga ikan.

Ketimpangan tersebut juga tidak serta merta menjadi kesalahan *pengamba'* yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam memulai bisnis *amba'an*, sumber permodalan *pengamba'* umumnya beragam. Artinya, sumber permodalan tersebut bukan merupakan "dana segar" yang diperoleh tanpa konsekuensi bunga. Sebuah mekanisme mempermudah permodalan *pengamba'* menjadi isu yang menarik agar pemotongan harga ikan bisa diturunkan dari besaran pemotongan saat ini.

Selain itu, hubungan antara pemilik modal (*pengamba'*) dan nelayan pada dasarnya sangat lentur, terkesan tidak kaku dan lebih bersifat kekeluargaan. Nelayan bisa kapan saja mengembalikan pinjamannya asal tetap pada komitmen penjualan ikan kepada *pengamba'*. Bertahannya nelayan dalam sistem *amba'an* salah satu alasannya karena sistem yang ditawarkan oleh para *pengamba'* memberikan banyak kemudahan bila dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain seperti bank dan juga koperasi. Pola hubungan yang terbentuk lebih condong pada bagaimana mempertahankan kedudukannya pada fungsi dan perannya masing-masing sebaik mungkin.

#### Akses Sumber keuangan formal

Pandangan yang mengatakan bahwa nelayan akan memilih sumber keuangan formal untuk menghindari jerat *pengamba'* tidak tampak di Desa Kedungrejo. Sekalipun telah ada koperasi yang menyediakan kredit dengan bunga yang lebih kecil, namun tetap saja hubungan antara patron yang diperankan oleh *pengamba'* dan klien oleh nelayan tidak bisa dinegasikan. *Pengamba'* sebagai penyedia kredit informal memiliki keistimewaan dibanding lembaga keuangan formal. *Pengamba'* bukan sekedar menyediakan uang untuk keperluan transaksi, tetapi juga memberikan bantuan dalam bentuk barang. Hal ini tak lain karena hubungan antara *pengamba'* dan nelayan bukan lagi bersifat hubungan dalam kaitan ekonomi, melainkan sudah melewati batas hubungan informal yang didasari rasa saling percaya dan saling membutuhkan satu sama lain. Yustika (2015) menyatakan bahwa dengan karakter yang fleksibel, biasanya lembaga

keuangan informal ini memiliki daya tahan yang kuat untuk hidup di wilayah perdesaan [8].

#### Hubungan Sosial dan Ekonomi antara Pemilik Modal (*Pengamba'*) dan Nelayan

Nelayan Muncar menggunakan jaringan keluarga dan kekerabatan untuk menutupi kebutuhan hidupnya di saat krisis ekonomi keluarga terjadi. Selain itu, tidak jarang nelayan menggunakan jaringan *pengamba'* yang berperan sebagai patron dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan modal produksi.

Untuk mengikat perannya, *pengamba'* mengikat nelayan dengan hutang. Hutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hutang perahu dan hutang pribadi. Kedua hutang ini mempunyai fungsi sebagai pengikat antara nelayan dan pemilik modal. Ikatan hutang memberikan implikasi terhadap harga jual nelayan. Nelayan wajib menjual ikan kepada satu *pengamba'* walaupun memiliki harga jual lebih rendah dan bisa menjual kepada *pengamba'* lain dengan syarat melunasi hutangnya.

Jasa yang ditawarkan *pengamba'* antara lain adalah dana pinjaman pembelian kapal, pembelian dan perbaikan mesin, serta perbaikan alat tangkap. Dengan jasa pinjaman modal tersebut, peran *pengamba'* menjadi sangat penting dalam menjamin pekerjaan dan penghidupan subsistensi dasar nelayan. Umumnya, patron diharapkan memberikan jaminan pada saat bencana ekonomi, membantu menghadapi keadaan sakit atau kecelakaan, atau membantu pada saat panen gagal [9]. Peran *pengamba'* semakin dominan saat lembaga keuangan formal (bank dan koperasi) tidak maksimal melakukan penetrasi ke dalam struktur masyarakat nelayan. Hal ini setidaknya disebabkan oleh masyarakat nelayan yang kurang mendukung berbagai kemudahan bank (kasus dana KUR Bank BRI) dengan enggan melunasi pinjaman dan bunga, akibatnya terjadi penarikan agunan kepada nelayan. Kegagalan peminjam pada kredit sebelumnya biasanya berdampak pada tidak mendapatkan kepercayaan kembali ketika mengajukan pinjaman di kemudian hari.

Salah satu ciri penghidupan subsisten pada dasarnya adalah faktor ketergantungan yang sangat tinggi pada alam. Umumnya, ketidakmampuan nelayan dalam merencanakan pendapatan akibat terlalu bergantung pada alam. Ketergantungan tersebut mengharuskan mereka untuk hidup berdasarkan standar minimal untuk bertahan hidup. Ketidaksanggupan nelayan dalam melakukan kontrol terhadap hasil tangkapan juga mengakibatkan munculnya sikap pasrah dan

menerima keadaan sebagai sebuah kondisi yang normal [9,10]. Kontrol yang demikian terbatas terhadap alam biasanya diwujudkan dengan melakukan personifikasi terhadap kekuatan alam melalui ritual “petik laut”.

Fungsi *pengamba'* tidak terbatas dalam aktivitas penjualan ikan saja. Selain itu, tersirat hubungan yang didalamnya terdapat aktivitas saling memberi dan saling mengerti peran masing-masing, baik *pengamba'* maupun nelayan. Saat *pengamba'* memberikan perhatian kepada nelayan saat musim padangan dan ayuman, maka nelayan juga akan membalas perhatian tersebut dengan kepatuhan menjual ikan kepada *pengamba'*. Saat hubungan tersebut tidak berlaku timbal balik, maka nelayan akan melunasi pinjamannya dan mencari *pengamba'* lain. Scott mendefinisikan ekonomi moral sebagai pengertian petani tentang keadilan ekonomi dan definisi kerja mereka tentang eksploitasi, serta pandangan mereka tentang pungutan terhadap hasil produksi mereka [11].

Ikatan patron-klien yang tercipta pada masyarakat nelayan di Desa Kedungrejo terjadi dalam kondisi sosial-ekonomi yang timpang, yaitu ada sebagian orang yang menguasai sumber-sumber kehidupan, sementara yang lainnya tidak. Ikatan patron-klien bersifat rangkap, yang meliputi hubungan timbal-balik antara dua orang yang dijalin secara khusus (pribadi) atas dasar saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima. Dalam ikatan ini pihak patron memiliki kewajiban untuk memberi perhatian kepada kliennya layaknya seorang bapak kepada anaknya.

Bentuk keterikatan sengaja dilanggengkan oleh para *pengamba'* dengan alasan keberlangsungan usaha. Dalam aktivitas ekonomi tersebut, terdapat kepentingan-kepentingan yang bersifat politik dan sosial. Keberadaan *pengamba'* telah menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi nelayan berdampak perilaku sosial nelayan melalui upaya mewujudkan rasa terima kasih melalui kepatuhan menjual hasil tangkapan ikan. Dari sisi politik, jaminan ekonomi *pengamba'* kepada nelayan akan melanggengkan ikatan usaha keduanya.

Damsar (1997) menyatakan norma timbal-balik ini merupakan rumus moral sentral bagi perilaku antar individu, antara nelayan dengan pemilik modal (*pengamba'*). Norma resiprositas sebagai rumusan moral ini merupakan kunci dari etika subsistensi. Prinsip moral ini berdasarkan pemikiran bahwa seseorang harus membantu mereka yang pernah membantu, atau paling tidak jangan merugikannya [7]. Prinsip itu mengandung

arti bahwa suatu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan satu kewajiban timbal-balik untuk membalasnya dengan nilai yang setidaknya-tidaknya sebanding di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban membalas budi merupakan suatu prinsip moral yang paling utama dan berlaku bagi hubungan baik antara pihak yang sederajat maupun yang tidak sederajat [11].

#### **Faktor-Faktor yang Menunjang Peran Strategis Pemilik Modal (*Pengamba'*) dalam Pemberdayaan Nelayan**

Keseluruhan aktivitas *pengamba'* secara langsung menjamin keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan dan berdampak pada keberlanjutan sumber pendapatan nelayan. Terputusnya hubungan antara nelayan dan *pengamba'* membawa dampak besar yaitu tersendatnya kegiatan usaha penangkapan ikan nelayan. Dari data BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015, penduduk Desa Kedungrejo yang menjalankan profesi sebagai nelayan pada tahun 2014 sebanyak 5.589 nelayan. Implikasi yang muncul kemudian adalah terciptanya pengangguran yang menjadi penyebab kemiskinan. Sebagaimana dinyatakan oleh Yustika (2015) bahwa lembaga keuangan informal mendistribusikan pendapatan diantara anggota komunitas dan menyediakan bentuk-bentuk jaminan sosial yang bisa mengatasi fluktuasi likuiditas masyarakat miskin [8].

Keberlangsungan usaha pengolahan ikan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Keberadaan *pengamba'* dalam mengupayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi lewat jaminan permodalan dan perbaikan kerusakan armada nelayan menjadi kunci penting ketersediaan bahan baku produksi. Tersendatnya pasokan ikan dari nelayan akan berdampak panjang pada keberlangsungan segala macam industri pengolahan ikan baik skala besar maupun kecil. Maka tepat jika Kusnadi (2001) menyatakan bahwa *pengamba'* berkedudukan sebagai “pintu gerbang” pengeluaran ikan nelayan [12].

Dalam melakukan penangkapan ikan dilaut, nelayan dihadapkan pada resiko bangkrut yang setiap saat bisa terjadi. Tingkat resiko yang tinggi juga didukung dengan ketergantungan nelayan pada fluktuasi musim. Nelayan tidak mampu mengontrol dan merencanakan hasil tangkapan di masa depan. Kondisi ini sangat berbeda dengan jenis atau tipe perikanan budidaya. Menurut data PPI Muncar 2015, periode 4 tahun sejak tahun 2011 sampai dengan 2013, produksi ikan lemuru

di perairan Selat Bali berada pada kondisi terendah sejak tahun 2004.

**Tabel 3 Produksi Tahunan Ikan Lemuru Muncar Tahun 2004 – 2013**

Tahun	Produksi (Kg)
2004	35.407.836
2005	20.045.933
2006	114.081.138
2007	120.198.087
2008	61.851.120
2009	63.213.631
2010	39.372.809
2011	3.669.736
2012	6.309.491
2013	9.071.291

Sumber : PPI Muncar 2015

Kelangkaan sumber daya menjadi faktor penyebab krisis subsistensi masyarakat nelayan. Pola hubungan patron-klien menjadi sebuah *exit strategy* nelayan dalam menghadapi krisis subsistensi. Patron menyediakan jaminan sosial ekonomi dan pekerjaan bagi klien, yang kemudian dibayar oleh klien dalam bentuk kepatuhan dan tenaga. Sesuai dengan konsep ekonomi moral Scott (1981), klien tidak mengambil risiko yang bertujuan mendapatkan keuntungan berlebih, karena tidak adanya jaminan mendapatkan keuntungan yang sama di masa yang akan datang. Klien cenderung mempertahankan hubungan tersebut karena dapat menjamin subsistensinya di saat-saat kritis, walaupun secara perolehan pendapatan dirasakan sangatlah kecil. Dalam hal ini nelayan juga memiliki kehendak mempertahankan hubungan karena akan mendapatkan jaminan krisis subsistensi. Umumnya, patron diharapkan memberikan jaminan pada saat bencana ekonomi, membantu menghadapi keadaan sakit atau kecelakaan, atau membantu pada saat panen gagal [9,11].

Prinsip menghindari risiko dan mengutamakan selamat juga melatarbelakangi pengaturan teknis, sosial, dan moral dalam satu tatanan agraris kapitalis. Scott menekankan bahwa petani subsisten tidak mengutamakan investasi dan surplus produksi, karena setiap orang membutuhkan tempat dan penghidupan. Oleh karena itu, ada kecenderungan pada masyarakat petani untuk memberlakukan kontrol sosial terhadap anggota yang kaya supaya membagi kekayaannya kepada yang miskin [11].

Jaringan keluarga dan kekerabatan serta pola hubungan patron-klien menjadi sebuah jalan keluarnelayan dalam menghadapi krisis subsistensi. Pola hubungan yang terjadi antara

patron dan klien didasari atas rasa saling percaya dan mempertimbangkan aspek kekeluargaan yang tinggi. Hubungan juga didasari atas rasa saling menguntungkan dalam bentuk yang berbeda dan resiprositas.

Bagi seorang *pengamba'*, saat telah memiliki modal, memulai sistem *amba'an* cukup dengan mengetahui identitas nelayan. Scott menyatakan bahwa sifat tata muka dalam relasi patron klien menunjukkan bahwa sifat pribadi terdapat di dalamnya. Seorang patron biasanya sangat mengenal kliennya, demikian juga sebaliknya sehingga membuat ikatan semakin kuat. Adanya hubungan timbal balik diantara keduanya membangkitkan rasa saling percaya dan saling menjaga[9].

**Bentuk Pelibatan Pemilik Modal (*Pengamba'*) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan**

Selama ini, *pengamba'* belum dipandang sebagai aktor dalam program pemberdayaan nelayan Muncar, padahal pengaruh yang dimiliki *pengamba'* dalam kehidupan sosial masyarakat pesisir sangatlah besar. Kuatnya jaringan pemasaran ikan dan permodalan adalah domain ekonomi para *pengamba'* di Muncar. Selain itu, status sosial *pengamba'* dalam struktur sosial masyarakat nelayan Muncar menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebab selama ini kebijakan modernisasi perikanan tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh pedagang perantara [1].

Lebih lanjut, Kusnadi juga menguraikan alasan keengganan pemerintah melibatkan *pengamba'* dalam program pemberdayaan nelayan yaitu: (1) masih kuatnya pandangan negatif terhadap *pengamba'* sebagai "rentenir" yang membebani nelayan, maka jika dilibatkan muncul kekhawatiran akan memanfaatkan program-program pemberdayaan tersebut untuk kepentingannya sendiri (2) *pengamba'* sudah dianggap memiliki kemampuan yang berlebih dalam ekonomi, sehingga jika dilibatkan dalam program pemberdayaan justru akan memperkaya *pengamba'* dan menyalahi substansi program pemberdayaan [13].

Salah satu alasan sistem *amba'an* mampu bertahan hingga saat ini adalah karena memiliki kesesuaian dengan karakteristik masyarakat nelayan tersebut sehingga bisa diterima dengan sangat baik oleh nelayan. Namun, menurut Yustika kekurangan utama dari kelembagaan keuangan informal terletak pada tingkat bunga yang sangat tinggi. Dalam prakteknya, sekalipun dirasa wajar, dominansi *pengamba'* sebagai

patron dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari nelayan sebagai klien [8].

Pemerintah hendaknya melakukan pengaturan dalam sistem bagi hasil tersebut. Dalam hal ini regulasi pemerintah sangat diperlukan guna mengatur mekanisme yang berimbang antara penyedia kredit dan penerima kredit. Pemerintah dapat mendesain regulasi dengan jalan membatasi tingkat suku bunga maksimal yang diperbolehkan dalam hubungan pinjaman antara nelayan dan *pengamba'* [8].

Aktor pemberdayaan masyarakat haruslah diprakerankan oleh pihak maupun perorangan yang mengetahui karakteristik masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan tersebut. Hounkonnou dalam Yustika menyatakan bahwa perubahan kelembagaan pada sektor pertanian dapat dilakukan dengan strategi yang fokus pada keterlibatan aktor kunci yang mendominasi dalam sebuah jaringan yang dapat memberikan pembelajaran pada semua pihak dan dimanfaatkan sebagai kepentingan bersama [8].

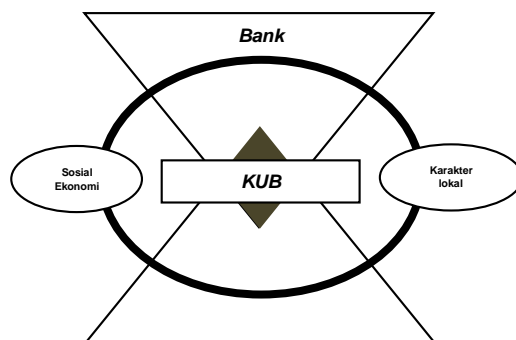
Pilihan bentuk kebijakan pemberdayaan nelayan kaitannya dengan akses permodalan dan pemasaran dengan memanfaatkan relasi antara *pengamba'* dan nelayan ditawarkan dengan membentuk lembaga lokal sejenis Kelompok Usaha Bersama. Pilihan ini dinilai paling rasional jika ingin memberdayakan nelayan namun disisi lain tidak menggeser atau bahkan menghapus pranata ekonomi yang selama ini muncul dan tumbuh di kalangan masyarakat nelayan. Asumsi dasarnya bahwa *pengamba'* lebih mengetahui rekam jejak (*track record*) dari pelaku ekonomi pedesaan, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan dapat diperkecil [8].

Pilihan menggabungkan keduanya tentu perlu dipertimbangkan, utamanya untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan sumber permodalan. Adaptor sosial dalam penelitian ini pada tataran praktis dapat diprakerankan oleh himpunan *pengamba'* dalam sebuah KUB dimana di dalamnya ada hubungan antara nelayan, KUB dan juga Bank sebagai penyedia kredit. Identitas *pengamba'* dalam sebuah KUB masih terlihat dan berperan dalam akses *chanelling* kredit bagi nelayan. Sederhananya, pada titik KUB inilah ada proses penyelarasn antara sistem keuangan formal ke dalam bentuk kredit informal. Sebagai sebuah adaptor sosial, peran *pengamba'* adalah mendekatkan bank ke dalam jangkauan masyarakat nelayan [3].

Nomenklatur “kelompok usaha bersama” dipilih untuk menghindari sistem pencairan dana dan pembayaran kredit kepada nelayan berdasarkan jangka waktu dan penggunaan agunan sebagai satu-satunya jalan mendapatkan sumber permodalan. Karena disadari atau tidak, selama ini mekanisme pencairan kredit semacam ini akan semakin menjauhkan jangkauan golongan ekonomi rendah seperti halnya petani dan nelayan dengan lembaga ekonomi formal bentukan pemerintah. Selain masuk dalam golongan masyarakat dengan pendidikan rendah, tipe pendapatan yang musiman dan tidak menentu, sangat bergantung terhadap iklim dan cuaca, dan umumnya aktivitas ekonomi nelayan dilakukan dengan resiko yang sangat tinggi telah mengakibatkan nelayan susah mengakumulasikan pendapatan mereka. Memaksa menggunakan koperasi di tengah susahnya merencanakan pendapatan akan semakin menekan masyarakat nelayan ke dalam kemiskinan itu sendiri.

Kelemahan pokok dari lembaga keuangan informal adalah ketimpangan posisi antara kreditor dan debitor. Oleh karena itu, bila ingin mengembangkan lembaga keuangan informal, maka pekerjaan utamanya adalah memperkuat posisi atau daya tawar nelayan dan pemerintah hadir dalam memberikan batasan maksimal yang dapat dikenakan oleh lembaga keuangan informal kepada penerima pinjaman (debitor). Kelebihan lembaga keuangan formal terletak pada bunga yang kecil. Sedangkan, untuk lembaga keuangan informal, tampak secara nyata bahwa keunggulannya adalah pada prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (*personal relationship*), dan waktu pengembalian yang kredit yang fleksibel (*negotiable payment*) [8].

Setelah dilakukan pemetaan terhadap kelebihan dan kekurangan kedua kelembagaan tersebut, akan mempermudah dalam memperoleh gambaran model kelembagaan sektor finansial yang dapat dikembangkan di masyarakat nelayan yaitu sebagai berikut:





*Nelayan*

**Gambar 1 Skema Pelibatan *Pengamba'* dalam Pemberdayaan Nelayan**

Sumber: Adiplas (Susilo, 2012) dan Desain Kelembagaan Sektor Finansial Pedesaan (Yustika, 2015) dimodifikasi oleh penulis

Operasionalisasi Model

1. Pada hubungan antara Bank dan *Pengamba'* berlaku mekanisme sebagaimana diatur dalam aturan perbankan.
2. Pada hubungan antara *Pengamba'* dan Nelayan berlaku mekanisme pinjaman berdasarkan norma lokal yang disepakati.
3. Intervensi pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan regulasi mengenai sistem bagi hasil yang proporsional antara *pengamba'* dan nelayan.

Singkatnya, pada skema ini *pengamba'* sebagai penyedia kredit informal dijadikan sebagai agen yang mencari dan mengeksekusi kredit kepada masyarakat nelayan dengan cara berhimpun dalam KUB, sedangkan lembaga keuangan formal menjadi penyedia dana. Supervisi dilakukan oleh pemerintah lewat regulasi. Ketaatan dan komitmen terhadap pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi syarat wajib bagi para penyedia kredit informal dalam menjalankan kegiatan bisnis pada lembaga lokal. Berhimpunnya *pengamba'* menjadi syarat wajib agar pemerintah daerah mudah melakukan supervisi melalui regulasi [8]. Setidaknya dengan model seperti ini, semua pihak relatif diuntungkan yaitu:

Bagi pemerintah :

1. Pemerintah mudah melakukan monitoring
2. Pendampingan usaha bisa dilakukan langsung oleh *pengamba'*

Bagi nelayan :

1. Menjamin subsistensi dan jaminan perlindungan nelayan
2. Menghindari sistem bagi hasil yang kurang proporsional

Bagi *pengamba'*

1. Mempermudah permodalan
2. Keberlangsungan usaha dan meningkatnya pendapatan

**KESIMPULAN**

1. Hubungan sosial dan ekonomi antara pemilik modal (*pengamba'*) di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar bersifat

patron-klien. Jaminan yang diberikan oleh *pengamba'* tertuju pada pemenuhan kebutuhan kolektif nelayan. *Pengamba'* dalam kedudukan sosial yang lebih tinggi menyediakan jaminan sosial ekonomi dan pekerjaan dasar bagi klien, yang kemudian dibalas dalam bentuk kepatuhan dalam menjual ikan. Hubungan antara *pengamba'* dan nelayan tidak terbatas pada hubungan ekonomi, melainkan berdimensi sosial dan politik yang didasari rasa saling percaya dan saling membutuhkan satu sama lain.

2. Faktor yang menunjang peran strategis pemilik modal (*pengamba'*) dalam pemberdayaan nelayan diantaranya:

- a. Nelayan susah mengakses lembaga keuangan formal karena terlalu formal birokratis dan membutuhkan persyaratan agunan yang berat.
- b. *Pengamba'* merupakan bagian integral dari masyarakat nelayan sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik terhadap rekam jejak dan karakteristik nelayan.
- c. Aktivitas ekonomi *pengamba'* menjamin keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan dan berdampak pada keberlanjutan sumber pendapatan nelayan dan ketersediaan bahan baku usaha pengolahan ikan baik skala besar maupun kecil.
- d. Nelayan tidak dapat merencanakan pendapatan karena besarnya tingkat ketergantungan nelayan terhadap faktor alam. Akibatnya, nelayan susah melakukan *saving* pendapatan dan pada akhirnya *pengamba'* menjadi jalan keluar (*exit strategi*) untuk memenuhi kebutuhan.

3. Bentuk kebijakan dengan memanfaatkan relasi antara *pengamba'* dan nelayan ditawarkan dengan membentuk lembaga lokal sejenis Kelompok Usaha Bersama sebagai sebuah Adaptor sosial dalam mendekati lembaga keuangan formal dengan nelayan [3]. Pilihan ini dinilai paling rasional jika ingin memberdayakan nelayan namun disisi lain tidak menggeser atau bahkan menghapus pranata ekonomi yang selama ini tumbuh dan bertahan di kalangan masyarakat nelayan Muncar.

**SARAN**

Hasil penelitian ini secara teoritis menghasilkan proposisi yang merupakan tesis yang melengkapi konsep relasi patron-client dan etika subsistensi serta konsep Adaptor sosial yang kemudian dikembangkan dalam Adaptor Sosial Inti Plasma [3,9,11].

Hubungan sosial ekonomi antara pengamba' dan nelayan pada dasarnya memiliki beberapa implikasi yang dapat dipergunakan untuk: Pertama, kerekatan hubungan antara pengamba' dan nelayan dapat dimanfaatkan untuk menjangkau partisipasi nelayan dalam program pemberdayaan. Kedua, keuletan dan kesuksesan pengamba' dalam menjalankan usaha bisa digunakan untuk memunculkan motivasi nelayan mengenai jalan lain mendapatkan sumber-sumber ekonomi di lingkungan masyarakat pesisir selain berprofesi sebagai nelayan.

Bagi penelitian selanjutnya kami sarankan agar mengembangkan mekanisme yang lebih operasional dalam membentuk kemitraan antara bank, KUB dan nelayan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir menggunakan cara pandang sosiologis dengan memberikan perhatian kepada bentuk kelembagaan yang dikehendaki oleh masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Universitas Brawijaya yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Edi Susilo MS dan Drs. Kusnadi, MA karena telah menginspirasi karya tulis ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepadamasyarakat Desa Kedungrejo atas kesediannya menjadi tempat penelitian dan utamanya para informan yang bersedia membantu penulis mendapatkan data penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Kusnadi. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Jogjakarta: Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan. 2004.
- [2]. Kusnadi. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora. 2006.
- [3]. Susilo EP. *Pengembangan Struktur Sosial Progresif-Integratif Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan*

- Pangan di Kawasan Indonesia Timur*. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. 2010.
- [4]. Miles MB. *Qualitatif Data Analisis: A Method Source Book*. USA: Sage Publications, Inc. 2014.
- [5]. Herlambang AP. *Analisa Tingkat Kemiskinan Masyarakat Nelayan Perikanan Tangkap Jawa Timur (Metode Sustainable Livelihood Approach)*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya. 2014.
- [6]. Hasbullah J. *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press. Kusnadi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora. 2006.
- [7]. Muhartono R. *Pola Adaptasi Nelayan Dalam Mengimbangi Dominasi Pemilik Modal (Kasus Komunitas Nelayan Rampus Di Cilincing, Jakarta Utara)*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia. 2011.
- [8]. Yustika AE. *Konsep Ekonomi Kelembagaan Perdesaaan, Pertanian dan Kedaulatan Pangan*. Malang: Empat Dua Media. 2015.
- [9]. Scott CJ. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
- [10]. Scott CJ. *Senjatanya Orang-orang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2000.
- [11]. Scott CJ. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES. 1981.
- [12]. Kusnadi. *Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal*. Bandung: Humaniora Utama Press. 2001.
- [13]. Kusnadi. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: AruzzMedia. 2009.